

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN**

***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE
HEAD ELECTION IN RANTAU BAYUR DISTRICT,
BANYUASIN REGENCY***

Ruddy Permana Putra^{1*)}, Icuk M. Sakir²⁾, Konar Zuber³⁾

¹ Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka

²Dosen STISIPOL Candradimuka Indonesia

³Dosen STISIPOL Candradimuka Indonesia

^{*}Email : abidboy39@gmail.com

ABSTRAK

Kepala Desa memiliki peran strategis dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan desa serta mengelola sumber daya dan anggaran yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu, proses pemilihan kepala desa harus dijalankan dengan transparan, adil, dan akuntabel guna memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan siap untuk mengabdikan kepada masyarakat. Permasalahan yang terjadi diantaranya Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tentang calon kepala desa, visi-misi, dan program kerja mereka dapat menghambat pemilihan dalam membuat keputusan yang informan dan bijaksana, Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses pemilihan kepala desa dapat menciptakan peluang untuk terjadinya pelanggaran dan kecurangan. Demokrasi merupakan suatu bentuk Pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki kesempatan yang sama atau hak yang sama di dalam mengambil suatu keputusan guna menentukan masa depan kehidupannya. Penelitian ini adalah mengevaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Tujuan utama pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah untuk memilih kepala desa yang memiliki integritas, kapabilitas, dan dedikasi untuk melayani masyarakat desa. Dengan pemilihan kepala desa yang adil dan demokratis, diharapkan masyarakat desa dapat memiliki pemimpin yang mampu memajukan desa dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian evaluasi model CIPP bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan adanya konteks, input, proses dan produk dimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Kepala Desa, Pemilihan, CIPP, Rantau Bayur.

ABSTRACT

The Village Head has a strategic role in preparing and implementing village development plans and managing the resources and budget owned by the village. Therefore, the village head election process must be carried out in a transparent, fair and

accountable manner to ensure the election of quality leaders who are ready to serve the community. The problems that occur include limited community access to information about village head candidates, their vision and mission, and work programs that can hinder voters from making informed and wise decisions. Lack of oversight and transparency in the village head election process can create opportunities for interference and fraud. Democracy is a form of government in which all citizens have equal opportunities or equal rights in making decisions to determine the future of their lives. This study is assessing the implementation of village head elections in Rantau Bayur District, Banyuasin Regency. The main objective of implementing village head elections is to elect village heads who have integrity, capability, and dedication to serve the village community. With a fair and democratic village head election, it is hoped that village communities will have leaders who are able to advance the village and create prosperity for all its citizens. The research approach used is a qualitative descriptive approach. The results of the CIPP model evaluation research show that the implementation of village head elections must be carried out in a transparent and accountable manner to get leaders who are in accordance with the needs of the community with the context, input, process and product where the implementation of village head elections in Rantau Bayur District, Banyuasin Regency has gone well.

Keywords: Village Head, Election, CIPP, Rantau Bayur.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mendukung demokrasi. Hal ini terlihat dari kebebasan yang diberikan kepada setiap warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat dan memantau jalannya pemerintahan. Persyaratan tersebut tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, serta perbuatan lain yang dipersamakan dengan itu, diatur dengan undang-undang”.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara mempunyai kesempatan atau hak yang sama untuk memutuskan bagaimana kehidupannya akan berkembang di masa depan. Lincoln menyatakan bahwa demokrasi didefinisikan sebagai

“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Di negara demokrasi, pemungutan suara biasanya dilakukan untuk memilih presiden dan wakil rakyat. Voting disini adalah proses menandai suatu pilihan dengan cara voting atau pengecekan. Pemungutan suara biasanya digunakan untuk mengambil keputusan yang bertujuan menentukan hasil suatu proses pemilu. Pemungutan suara berlangsung sangat tidak adil. Penghitungan suara seringkali melibatkan penipuan. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, baik pemilu maupun pemilu daerah, disebabkan oleh adanya permasalahan dalam penggunaan suara dalam proses pemilu. sehingga masyarakat meragukan hasil pemilu yang diselenggarakan secara elektronik.

Amandemen No. 1 menandai era reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mulai berlaku. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mandiri dan mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi guna mempercepat kesejahteraan warga negaranya dengan memperkuat dan memantapkan prinsip demokrasi.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terbaru Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kekuasaan mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan dari komunitas lokal.

Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode pemungutan suara secara elektronik yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem konvensional yang digunakan sebelumnya, juga telah diterapkan pada tingkat paling bawah, yaitu pemilihan kepala desa dan kepala desa, dan mulai menggantikan metode pemungutan suara manual di berbagai wilayah di Indonesia. . milenium baru. Tata cara pemungutan suara telah mengalami perubahan yang signifikan akibat perkembangan teknologi informasi saat ini.

Dalam setiap pemilu pasti ada permasalahan, dan permasalahan tersebut pasti menjadi kendala. Hal ini juga terlihat pada pemilihan umum kepala desa yang menggunakan sistem baru yaitu pemungutan suara elektronik.

Sulitnya proses seleksi dan permasalahan lainnya, seperti kurangnya jangkauan KPUD untuk memperjelas prosedur pemilu, merupakan kendala yang umum terjadi.

Pada saat pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih transparan, cepat, dan hemat biaya, menjamin persaingan yang sehat dan partisipatif, serta menjamin tingkat keterwakilan tertentu, masyarakat sebelumnya harus memilih di TPS, namun sejak pemilu elektronik, hal tersebut tidak lagi dilakukan. kasus. diperkenalkan, mereka digantikan dengan menyentuh layar sentuh. itu lebih besar.

Sistem pengelolaan desa di Indonesia mencakup pemilihan kepala desa pada tingkat paling bawah.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan penelitian ini mengevaluasi keberhasilannya. Tujuan utama pemilihan kepala desa adalah untuk memilih calon yang akan mengabdikan pada masyarakat desa dengan integritas, bakat dan dedikasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami manajemen sumber daya manusia khususnya ilmu administrasi, serta memberikan pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat dirinci dalam penelitian ini..

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Stufflebeam, (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010: 118) mengungkapkan bahwa, *“The CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation*

is not to prove but improve". Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Berikut ini akan di bahas komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi, *context, input, process, product*.

a. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Tujuan utama evaluasi konteks, menurut Stufflebeam (1983:128) dalam Hamid Hasan, adalah untuk memastikan kelebihan dan kelemahan penilai. Evaluasi akan dapat menunjukkan perbaikan-perbaikan yang perlu jika menyadari kekuatan dan kelemahan tersebut. Evaluasi konteks, menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, merupakan upaya mendeskripsikan dan merinci lingkungan kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, serta tujuan proyek.

b. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan, juga dikenal sebagai evaluasi masukan, adalah tahap kedua dari model CIPP. Evaluasi masukan menurut Eko Putro Widoyoko membantu dalam pengorganisasian keputusan, identifikasi sumber daya, pengambilan keputusan mengenai alternatif, penetapan tujuan mengenai rencana dan strategi, dan penetapan tujuan mengenai prosedur kerja.

Berikut unsur-unsur evaluasi masukan: 1) Sumber daya manusia; 2) Sarana dan prasarana penunjang; 3) Dana atau anggaran; dan 4) Prosedur dan aturan berbeda yang harus dipatuhi. Diungkapkan, menurut Stufflebeam, seperti dikutip Suharsimi Arikunto, pertanyaan tentang masukan menghasilkan penyelesaian permasalahan yang mendorong pelaksanaan program yang bersangkutan.

c. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Menurut Worthen dan Sanders (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010), evaluasi proses berfokus pada tiga tujuan utama: "1) melakukan deteksi atau prediksi dalam desain prosedural atau implementasinya selama tahap implementasi, 2) memberikan informasi untuk keputusan yang terprogram, dan 3) untuk memelihara catatan prosedur yang terjadi.". Evaluasi proses digunakan sebagai catatan atau arsip prosedur yang telah berlangsung, untuk mengidentifikasi atau mengantisipasi desain prosedural atau rencana implementasi selama fase implementasi, dan untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan program.

Pengumpulan data penilaian yang telah ditentukan dan digunakan dalam praktik pelaksanaan program merupakan bagian dari evaluasi proses. Pada dasarnya, evaluasi prosedur untuk menentukan seberapa baik

rencana telah dilaksanakan dan area mana yang memerlukan perbaikan. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi proses pada model CIPP menitikberatkan pada “apa” (what) kegiatan yang dilaksanakan dalam program, “siapa” (siapa) yang dipilih menjadi penanggung jawab program, dan “kapan” “(kapan) kegiatan akan selesai. Model CIPP memfokuskan evaluasi proses pada seberapa dekat kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

d. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk/Hasil)

Sax mendefinisikan evaluasi produk/hasil sebagai "untuk memungkinkan direktur proyek (atau teknisi) membuat keputusan program" (Eko Putro Widoyoko, 2010). Dalam mengambil keputusan apakah akan melanjutkan, menghentikan, atau mengubah program, manajer proyek dan pendidik berharap bahwa evaluasi proses akan bermanfaat. Sementara itu, Tayibnapi (2008: 14) menjelaskan bahwa tujuan evaluasi produk adalah untuk mendukung pengambilan keputusan di masa depan, baik mengenai hasil yang dicapai maupun tindakan yang diambil setelah program selesai.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami

fenomena – fenomena seperti perilaku, tindakan, dan lain-lain. - yang dihadapkan pada subjek penelitian. bertujuan untuk memahami dan memberikan penjelasan mengenai evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Handoko menjelaskan konteks, input, proses dan produk merupakan kategori variabel yang digunakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin.

- a. Suatu kegiatan yang direncanakan sebelumnya dilaksanakan dan evaluasi merupakan upaya untuk mengukur hasil secara objektif dan memberi nilai.
- b. Pemerintahan desa dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan.
- c. Kepala desa menjabat sebagai aparatur pemerintah desa yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang mengelola anggaran desa serta menjalankan fungsi pemerintahan dan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (disingkat BPD) adalah suatu badan yang dipilih secara demokratis yang anggotanya adalah wakil-wakil penduduk desa yang dipilih melalui wakil daerah. Badan ini menjalankan fungsi pemerintahan.

Dua jenis data berbeda yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu, Informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka, baik kualitatif maupun kuantitatif, disebut data kuantitatif.

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data dapat digolongkan menjadi data kuantitatif atau kualitatif tergantung pada jenisnya:

- a. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau masyarakat yang memerlukannya. Dalam penelitian ini observasi dan wawancara digunakan sebagai metode untuk memperoleh data primer.
- b. Data sekunder adalah informasi yang peneliti kumpulkan dari sumber yang dipublikasikan. Penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data.

Wawancara adalah dialog terfokus antara dua orang, pewawancara menanyakan atau mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara menjawab pertanyaan tersebut. Dengan menggunakan pedoman wawancara, peneliti dan informan melakukan wawancara langsung.

Dengan melihat dan mengamati secara langsung orang atau kelompok, observasi merupakan suatu teknik untuk menganalisis dan mendokumentasikan perilaku secara metodis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati secara langsung kondisi di lapangan, memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Suatu objek, keadaan, kondisi, serangkaian keadaan, tindakan, atau perilaku (misalnya tata letak suatu ruangan atau ventilasi di dalamnya) diamati atau dirasakan secara langsung selama observasi.

Observasi langsung evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Dengan mengkaji bacaan atau literatur berupa buku, dokumen, dan sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan informasi dari arsip yang disimpan oleh Kepala Desa Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Data yang sudah ada sebelumnya dari catatan dokumen dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi.

Data dokumenter terutama digunakan sebagai data pelengkap dan pelengkap terhadap data primer dalam penelitian ilmu sosial.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin akan dibahas pada bab ini. Gambaran penelitian evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dicari dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Peneliti berupaya menyelidiki teori dalam penelitian ini. Stufflebeam mengklaim bahwa itu terdiri dari beberapa dimensi, seperti Konteks, Input, Proses, dan Produk. Komponen penting dari siklus perencanaan dan pelaksanaan program adalah evaluasi.

Tercapainya tujuan program tidak dapat dijamin tanpa adanya penilaian. Namun, hal ini dapat ditentukan dengan

menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Keputusan dan tindakan strategis yang diambil sangat dipengaruhi oleh gambaran tingkat keberhasilan suatu program. Pada tahun 1966, Daniel Stufflebeam menciptakan model evaluasi CIPP.

Berikut adalah beberapa potensi sasaran yang mungkin menjadi fokus dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh kepala desa beliau mengatakan bahwa dengan sasaran pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dapat terlihat Partisipasi Aktif Warga Desa di antaranya Meningkatkan persentase partisipasi warga dalam proses pemilihan kepala desa. Peningkatan Persentase Partisipasi Meningkatkan persentase warga desa yang turut serta dalam pemilihan kepala desa. Mengatasi kendala yang mungkin menghambat partisipasi dari kelompok-kelompok ini.

Sosialisasi dan Edukasi Melakukan kampanye sosialisasi yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya partisipasi mereka dalam memilih pemimpin desa. Partisipasi yang Berkelanjutan Mendorong partisipasi aktif warga dalam aspek-aspek lain pembangunan desa, bukan hanya pada saat pemilihan saja.

Sementara sekretaris desa mengatakan bahwa dengan sasaran pemilihan kepala desa akan Peningkatan Transparansi dan Integritas Memastikan proses pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan integritas proses. Sementara masyarakat berpendapat bahwa sasaran pemilihan kepala desa dapat membawa Kesejahteraan

Masyarakat Desa Memilih pemimpin yang berkomitmen untuk mengembangkan program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sasaran ini menekankan pentingnya menjalankan proses pemilihan kepala desa dengan transparan dan menjauhkan praktik-praktik yang dapat merusak integritas proses pemilihan. Pemenuhan Standar Etika dan Integritas Menetapkan standar etika dan integritas yang harus diikuti oleh seluruh peserta, termasuk calon kepala desa, tim kampanye, dan penyelenggara.

Kontrol terhadap Praktek Korupsi dan Politik Uang Melakukan tindakan tegas terhadap praktik korupsi dan politik uang yang dapat merusak integritas pemilihan. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Memilih pemimpin yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Tujuannya adalah memastikan bahwa perempuan dan pemuda memiliki peran yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Keterwakilan yang Seimbang Memastikan bahwa calon perempuan memiliki peluang yang setara dengan calon pria dalam memasuki kompetisi pemilihan kepala desa.

Pemberian Pelatihan dan Keterampilan Memberikan pelatihan khusus kepada perempuan dan pemuda untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen yang diperlukan dalam peran kepemimpinan. Mengatasi Stereotip Mengatasi stereotip dan norma sosial yang mungkin menghambat partisipasi

perempuan dan pemuda dalam pemilihan kepala desa.

Penyediaan Ruang Partisipasi Menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dan pemuda untuk berpartisipasi dalam debat publik, pertemuan, dan kegiatan lain terkait pemilihan.

Dengan memberdayakan perempuan dan pemuda, desa dapat mengakses beragam potensi dan pandangan yang akan memperkaya pengambilan keputusan dan pembangunan secara keseluruhan.

Memilih pemimpin yang dapat berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa melalui kolaborasi dengan instansi keamanan setempat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Sasaran-sasaran ini mencerminkan berbagai aspek yang diharapkan dapat dihasilkan melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur.

Sasaran-sasaran ini dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat setempat. Dampak-dampak ini adalah cerminan dari bagaimana pelaksanaan sasaran-sasaran pemilihan kepala desa dapat membawa perubahan yang berarti dalam arah pembangunan dan kesejahteraan desa di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin.

Tujuan-tujuan yang ditekankan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai sasaran tersebut tidak hanya berdampak pada proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata terhadap

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi aktif warga desa menjadi landasan bagi semua sasaran lainnya, karena melalui partisipasi yang kuat, masyarakat dapat memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan desa. Pemberdayaan perempuan dan pemuda menghasilkan keterlibatan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, sementara perbaikan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi sosial mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Identitas desa yang diperkuat dan hubungan yang lebih erat antara pemimpin dan warga desa turut berkontribusi pada atmosfer yang positif dan harmonis. Secara keseluruhan, pelaksanaan sasaran-sasaran ini akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pemilihan kepala desa.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memastikan transparansi dan integritas, serta mendorong inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan, desa akan berkembang menjadi komunitas yang kuat, responsif, dan sejahtera. Pemilihan kepala desa di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan dan keberlanjutan.

Evaluasi masukan merujuk pada proses atau kegiatan dalam mengkaji atau menilai berbagai masukan atau input yang masuk ke dalam suatu sistem atau proses tertentu. Evaluasi masukan bertujuan untuk menilai kualitas, relevansi, dan kecocokan masukan tersebut dengan kebutuhan dan tujuan

dari sistem atau proses yang sedang berlangsung.

Hasil dari evaluasi masukan akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau penyesuaian sistem, pengambilan keputusan, atau untuk mengoptimalkan hasil yang diinginkan, evaluasi masukan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil yang dicapai dari proses atau sistem yang sedang berjalan. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, adalah aspek penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan lancar, adil, dan efisien.

Sarana dan prasarana Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa beliau mengatakan sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pemilihan kepala desa oleh sebab itu dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti Tempat Pemungutan Suara TPS merupakan lokasi di mana pemilih datang untuk memberikan suara.

Setiap TPS harus dilengkapi dengan bilik suara yang privasi, meja untuk petugas pemilu, dan kotak suara untuk mengumpulkan suara.

Penentuan Lokasi TPS Pemilihan lokasi TPS harus memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh pemilih dan memastikan bahwa lokasi tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat. Petugas di meja ini memastikan pemilih terdaftar dengan benar sebelum diberikan surat suara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemilihan kepala desa harus melibatkan semua masyarakat agar suara demokrasi dapat terlaksana dengan optimal.
2. Sarana dan prasarana serta mekanisme yang jelas memberikan dampak positif bagi terlaksananya pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel.
3. Pelaksanaan pemilihan kepala desa membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan mutu masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa yang tertib dan demokratis.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka saran dan kritik serta harapan ke depan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terus aktif terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serta melakukan monitoring dan evaluasi pada program kerja kepala desa yang telah di rencanakan.
2. Pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel dapat terus dilakukan sehingga konflik sengketa terhadap pemenang kepala desa terpilih dapat di hindari.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat terus di maksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri. E. 1989. Ajaran Sistem Pengelolaan Air. ITB. Bandung.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Kepmenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010. Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Depkes RI : Jakarta.
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. (2000). Kriteria Penyediaan Air Bersih.
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.(2007).
- Fair, G. M., Geyer, J. C., and Okun, D. A. 1996. *Wastewater System And Wastewater Engineering, Vol 1, Water Supply And Wasterwater*. New York: John Wiley and Sons.
- Indra Saputra dkk.Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone).Jurnal Ilmu Pemerintahan, hal.116, Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (109- 118)ISSN 1979-5645.
- Janwandri (2013). Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.eJournal IlmuPemerintahan , hal.238, 2013, 1 (1): 235-247 ejournal.ip.fisip-unmul.org.
- Kanth, M. Prudhvi, S.Maanasa, T. Naga Rupesh. 2014. *Design of Water Distribution Network by using EPANET Software*. Vijayawada : ELK Asia Psific Journals – Special Issue, ISBN 978-81-930411-5-4.
- Kause, M., & Frans, J. H. (2020). Evaluasi Dan Perencanaan Pengembangan Jaringan Air. *Jurnal Teknik Sipil*, IX(2), 255–268.
- Kodoatie. R. J. dan Sjarief. R. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu. Yogyakarta: Andi Offset.
- L.Stufflebeam, Daniel and Anthony J.Shinkfield. 2007. *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: A Wiley Imprint.
- McGhee, T.J. 1991. *Water Supply And Sewerage* . New York : McGraw-Hill. Paembonan, R. 2013. Efektivitas Tingkat Pelayanan PDAM Pada Zona 31 Dan 32 Kota Makasar. Tugas Akhir. Makasar: Teknik Sipil. Universitas Hasanuddin.
- Peavy, H. S et.al. 1985. *Environmental Engineering*. McGraw-Hill.Singapura.
- Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- Permana, A.D. 2019. Evaluasi Kebutuhan Air Bersih Di PDAM Tirta Muara Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Skripsi. Pekanbaru: Teknik Sipil. Universitas Islam Riau.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan kepala desa
Pdam Tirta Daroy Pada Zona I Banda
Aceh. Skripsi. Banda Aceh :
Teknik Lingkungan. Universitas
Islam Negri Ar-Raniry Banda
Aceh.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No.
16 Tahun 2005 Tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum. Jakarta.

Ramadhan, I. 2020. Pengembangan
Sistem Jaringan Distribusi.